

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aartje Tehupeiory, *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat di Negeri Soahuku-Amahai Maluku Tengah*, Jakarta: UKI Press, 2019.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bagir Manan, *Risalah Perubahan Konstitusi. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Chr. G. F. de Jong, *Sumber-Sumber tentang Sejarah Gereja Protestan di Maluku Tengah 1803-1900*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2012.
- Dieter Bartels, *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-Kristen Hidup Berdampingan di Maluku Tengah*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2017.
- Firman Sujadi, Achmad Dian, dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bee Media Pustaka, Jakarta, 2014.
- George Ritzer, *Sociological Theory*, McGraw Hill, New York, 2008.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Hendra Nurtjahjo, Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
- H. Erwin Owan, Zulkifli Ismail, Melanie Pita, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, 2021.
- Hisyam Ahyani, Asep Deni Adnan Bumaeri, Herniwati, dkk., *Hukum Adat*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2023.
- Jamie Davidson, David Henley, *The Revival of Tradition in Indonesian Politics the Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*, Routledge, New York, 2007.

- Leon Andretti, Sufyati, Puji Muniarty, dkk, *Metodologi Penelitian dan Analisis Data Comprehensive*, Penerbit Insania, Cirebon, 2021.
- M. Hasbullah, Dedi Supriyadi, *Filsafat Sejarah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Marc Hertogh, dkk, *Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich*, Hard Publishing Ltd, Oxford, 2009.
- Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020.
- Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, The Falcon's Wings Press, New York, 1947.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Timur, 2020.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1993.
- Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni FH UI, Depok, 2011.
- Program Pascasarjana UKI, *Pedoman Penulisan Tesis Tahun Akademik 2023/2024*, Universitas Kristen Indonesia, 2023.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sigit, Anik, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Palur Wetan, 2020.
- Sony Maulana Sikumbang, dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, Modul 1, HKUM4403, Universitas Terbuka, 2021.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2016.

United Nation, *State of the World Indigenous Peoples*, United Nation, New York, 2009.

Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi, 2016.

B. Jurnal / Tesis / Artikel Ilmiah

Aartje Tehupior, “Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah dalam Perspektif Hukum Tanah Adat”, *Journal of Indonesian Adat Law*, Vol. 2, No. 2, 2018.

A. Wirahwan Riza Wawo, “Peran Lembaga Adat terhadap Penyelesaian Tindak Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice di Kabupaten Gowa”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024.

Bintari, Joyce Ratna, Kosasih, “Laporan Hasil Survei Kepurbakalaan di Daerah Maluku (Pulau Ambon, Seram dan Sekitarnya)”, Nomor 8, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, Jakarta, 1977.

David Nelken, Eugen Ehrlich, “Living Law, and Plural Legalities”, *Theoretical Inquiries in Law*, Vol. 9, No. 2, 2008.

Gonzalo Aguilar, Sandra La Fosse, Hugo Rojas, dan Rebecca Steward, “South/North Exchange of 2009, The Constitutional Recognition of Indigenous Peoples in Latin America”, *International Law Review Online Companion*, Vol. 2, No. 2, 2010.

Griffiths, “What is Legal Pluralism”. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, No. 24, 1986.

Jaya Setiawan Sinaga, “Kedudukan Hukum Anak Adat dalam Pengelolaan Tanah Ulayat pada Masyarakat Adat Malind”, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

Kuswardani, “Pengembangan Metodologi Berbasis Sociology Jurisprudence”, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Surakarta, 2015.

Mikhail Antonov, “Eugen Ehrlich: State Law and Law Enforcement in Societal Systems”, *Law WP-BRP*, Vol. 33, 2014.

- M. Nur Sholikin, "Perbaikan Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Muhammad A. Rauf, "Politik Hukum Pembentukan Desa Adat dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia", *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Muhammad Dahlan, "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Muhammad Erfan, Nor Fadillah, Fitriah, "Hukum Adat di Indonesia: Asepki, Teori dan Penerapan", *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Nieves, "The Indigenous and the Struggle for Political Representation in Bolivia", Disertasi, University of South Florida, 2012.
- Rangga Trianggara, Ronny A, Dani R, "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Mengatasi Konflik Regulasi di Indonesia", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 4, 2025.
- Raymond Paradeys Fenetiruma, "Kekuatan Putusan Lembaga Masyarakat Adat dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Merauke", Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.
- Shireen Morris, Noel Pearson, "Indigenous Constitutional Recognition: Paths to Failure and Possible Paths to Success", *Journal of Thomson Reuters*, Vol. 91, 2017.
- Sirajuddin M, "Eksistensi 'Urf sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional", *Madania*, Vol. 19, No. 1, 2015.
- Tanti Kirana Utami, dkk, "Tantangan dan Hambatan Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indoensia", *Costumary Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky", *JISDIK Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2024.

C. Website

- "Besok Waraka Nalahia Gelar Panas Pela Darah." *Moluccas Times*, 19 Desember 2022, diakses dari <https://www.moluccastimes.id/besok-Waraka-nalahia-gelar-panas-pela-darah/> pada 9 Januari 2026.

“Dirjen Bimas Kristen Resmikan Desa Moderasi Beragama di Negeri Waraka Maluku Tengah.” Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, 05 Juni 2024, diakses dari <https://Maluku.kemenag.go.id/artikel/dirjen-bimas-kristen-resmikan-desa-moderasi-beragama-di-Negeri-Waraka-Maluku-tengah> pada 9 Januari 2026.

“Kajati Launching Rumah Restorative Justice Kejari Maluku Tengah.” Liputan Malteng, 29 Maret 2022, diakses dari https://malteng.liputan.co.id/article_read/kajati-launching-rumah-restorative-justice-kejari-675 pada 10 Januari 2026.

“Struktur, Pemerintah, Pemerintahan, Pengoptimalan, Regulasi.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, KBBI VI Daring, diakses dari <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id> pada 5 Maret 2026.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-448 Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih.

Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 189-214 Tahun 2021 tentang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih.

Konvensi ILO 169 Tahun 1989 tentang Konvensi Masyarakat Hukum Adat.

P. R. Lailossa, Penetapan Skema Pemerintahan Adat/Asal Usul, Dokumen Adat, Pemerintah Negeri Waraka, Waraka, tanpa tahun.

E. Data Empiris

Wawancara dengan Raja Negeri Waraka ke-20, Negeri Waraka, Kabupaten Maluku Tengah, 8 Januari 2026.

